Lampiran 2 Surat Dirjen PK
Nomor : S- 484/PK/2017
Tanggal 3 Agustus 2017

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Reperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kota Sukabumi	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame	-	√	Selesai
2	Kota Sukabumi	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan	-	√	Selesai
3	Kota Pekalongan	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan	-	√	Selesai
4	Kota Pekalongan	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah	-	√	Selesai
5	Kab. Kuningan	Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	√	Selesai
6	Kab. Semarang	Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai
7	Kab. Magelang	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai
8	Kab. Magelang	PerubahanKetiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai

Lampiran 2 Surat Dirjen PK
Nomor : S- 485/PK/2017
Tanggal 3 Agustus 2017

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Reperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kota Sorong	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai
2	Kota Sorong	Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
3	Kab. Bima	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
4	Kab. Lombok Timur	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum	-	√	Selesai
5	Kab. Teluk Bintuni	Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah	-	√	Selesai

Lampiran 2 Surat Dirjen PK
Nomor : S- 486 /PK/2017
Tanggal 3 Agustus 2017

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Reperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kota Tanjungbalai	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai
2	Kab. Dairi	Retribusi Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai
3	Kab. Lingga	Pajak Daerah	-	√	Selesai
4	Kab. Sukabumi	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	√	Selesai
5	Kab. Sukabumi	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan	-	√	Selesai
6	Kab. Purwakarta	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan	-	√	Selesai
7	Kab. Purwakarta	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir	-	√	Selesai
8	Kab. Purwakarta	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai
9	Kab. Tasikmalaya	Penyelenggaraan dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	-	√	Selesai

Lampiran 2 Surat Dirjen PK
Nomor : S- 475 /PK/2017
Tanggal 26 Juli 2017

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Reperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Provinsi Kepulauan Riau	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah	-	√	Selesai
2	Provinsi Kepulauan Riau	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai
3	Kab. Musi Rawas	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah	-	√	Selesai
4	Kab. Karo	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
5	Kab. Tapanuli Tengah	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan	-	√	Selesai
6	Kab. Tapanuli Tengah	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel	-	√	Selesai
7	Kab. Tapanuli Tengah	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan	-	√	Selesai
8	Kab. Tapanuli Tengah	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	√	Selesai
9	Kab. Donggala	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai
10	Kab. Karangasem	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	√	Selesai
11	Kab. Karangasem	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan	-	√	Selesai
12	Kab. Karangasem	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	-	√	Selesai

Lampiran 2 Surat Dirjen PK
Nomor : S- 472 /PK/2017
Tanggal 26 Juli 2017

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Reperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai
2	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai

Lampiran 2 Surat Dirjen PK
Nomor : S- 473 /PK/2017
Tanggal 26 Juli 2017

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Reperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Bungo	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan	-	√	Selesai
2	Kab. Asahan	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
3	Kab. Asahan	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai
4	Kab. Karanganyar	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan	-	√	Selesai
5	Kab. Sleman	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	√	Selesai

Lampiran 2 Surat Dirjen PK
Nomor : S- 474 /PK/2017
Tanggal 26 Juli 2017

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Reperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai

Lampiran 2 Surat Dirjen PK
Nomor : S- 455 /PK/2017
Tanggal 14 Juli 2017

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Reperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kota Semarang	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
2	Kota Binjai	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
3	Kab. Solok	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
4	Kab. Belitung Timur	Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
5	Kab. Belitung Timur	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai
6	Kab. Tanjung Jabung Barat	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
8	Kab. Pakpak Bharat	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	√	Selesai
9	Kab. Pakpak Bharat	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
10	Kab. Pakpak Bharat	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai
11	Kab. Manggarai	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai
12	Kab. Manggarai	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai

No.	Nama Daerah	Nama Reperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
13	Kab. Sikka	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai

Lampiran 2 Surat Dirjen PK
Nomor : S- 456 /PK/2017
Tanggal 14 Juli 2017

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Reperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kota Kendari	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
2	Kab. Konawe Kepulauan	Pajak Daerah	-	√	Selesai
3	Kab. Konawe Kepulauan	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	-	√	Selesai
4	Kab. Konawe Kepulauan	Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
5	Kab. Konawe Kepulauan	Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
6	Kab. Konawe Kepulauan	Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai

Lampiran 2 Surat Dirjen PK
Nomor : S- 450/PK/2017
Tanggal 7 Juli 2017

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Reperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Provinsi Kalimantan Timur	Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
2	Provinsi Kalimantan Timur	Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
3	Provinsi Kalimantan Timur	Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai
4	Provinsi Maluku	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai

Lampiran 2 Surat Dirjen PK
Nomor : S- 444 /PK/2017
Tanggal 22 Juni 2017

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Reperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Prov. Sumatera Barat	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
2	Prov. Sulawesi Tengah	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
3	Prov. Maluku Utara	Pajak Daerah	-	√	Selesai
4	Prov. Maluku Utara	Retribusi Daerah	-	√	Selesai
5	Prov. Maluku Utara	Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	√	*) Tidak diproses

Keterangan
*) Tidak diproses karena bukan raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Lampiran 2 Surat Dirjen PK
Nomor : S- 416 /PK/2017
Tanggal 31 Mei 2017

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Reperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Prov. Sulawesi Tenggara	Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
2	Prov. Sulawesi Tenggara	Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
3	Kota Bekasi	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan	-	√	Selesai
4	Kota Bekasi	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame	-	√	Selesai
5	Kota Sungai Penuh	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	√	Selesai
6	Kota Sungai Penuh	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 7 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan	-	√	Selesai
7	Kota Sungai Penuh	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan	-	√	Selesai
8	Kota Gunungsitoli	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai
9	Kota Gunungsitoli	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan	-	√	Selesai
10	Kota Gunungsitoli	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
11	Kab. Ogan Ilir	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai
12	Kab. Ogan Ilir	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	-	-	*) Tidak diproses
13	Kab. Ogan Ilir	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
14	Kab. Langkat	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing	-	√	Selesai

No.	Nama Daerah	Nama Reperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
15	Kab. Padang Lawas Utara	Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	-	*) Tidak diproses
16	Kab. Padang Lawas Utara	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	-	√	Selesai
17	Kab. Padang Lawas Utara	Retribusi Izin Gangguan	-	√	Selesai
18	Kab. Labuhanbatu Utara	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	√	Selesai
19	Kab. Labuhanbatu Utara	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	√	Selesai
20	Kab. Kampar	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
21	Kab. Ketapang	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	√	Selesai
22	Kab. Buton	Retribusi Izin Usaha Perikanan	-	√	Selesai
23	Kab. Pangkajene Kepulauan	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
24	Kab. Pangkajene Kepulauan	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
25	Kab. Bogor	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai
26	Kab. Tasikmalaya	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya	-	√	Selesai
27	Kab. Blora	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Blora	-	√	Selesai

Keterangan

*) Tidak diproses karena softcopy/hardcopy tidak disampaikan

Lampiran 2 Surat Dirjen PK
Nomor : S- 418 /PK/2017
Tanggal 31 Mei 2017

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Reperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Provinsi Bengkulu	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
2	Provinsi Bengkulu	Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai

Lampiran 2 Surat Dirjen PK
Nomor : S- 369 /PK/2017
Tanggal 2 Mei 2017

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Reperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Provinsi Bali	Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai

Lampiran 2 Surat Dirjen PK
Nomor : S- 352/PK/2017
Tanggal 13 April 2017

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Reperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kota Palangka Raya	Pajak Daerah	-	√	Selesai
2	Kota Palangka Raya	Retribusi Daerah	-	√	Selesai

Lampiran 2 Surat Dirjen PK
Nomor : S- 353 /PK/2017
Tanggal 13 April 2017

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Reperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Jepara	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai
2	Kab. Jepara	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 27 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai

Lampiran 2 Surat Dirjen PK
Nomor : S- 351 /PK/2017
Tanggal 13 April 2017

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Reperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kota Yogyakarta	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu	-	√	Selesai
2	Kota Yogyakarta	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai
3	Kota Magelang	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	-	√	Selesai
4	Kab. Bungo	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 25 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai
5	Kab. Bungo	Retribusi Tempat Khusus Parkir	-	√	Selesai
6	Kab. Simalungun	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai
7	Kab. Simalungun	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai
8	Kab. Simalungun	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
9	Kab. Simalungun	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
10	Kab. Banyumas	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
11	Kab. Sukoharjo	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai
12	Kab. Sukoharjo	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retrbusi Daerah	-	√	Selesai

No.	Nama Daerah	Nama Reperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
13	Kab. Tuban	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai
14	Kab. Tuban	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan	-	√	Selesai
15	Kab. Tuban	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	-	√	Selesai
16	Kab. Lamongan	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai
17	Kab. Lamongan	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	√	Selesai
18	Kab. Lamongan	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	√	Selesai
19	Kab. Pamekasan	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	√	Selesai

Lampiran 2 Surat Dirjen PK
Nomor : S- 335 /PK/2017
Tanggal 27 Maret 2017

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Reperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Provinsi Papua Barat	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Kendaraan Bermotor	-	√	Selesai
2	Kab. Barito Kuala	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	-	√	Selesai
3	Kab. Balangan	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	√	Selesai

Lampiran 2 Surat Dirjen PK
Nomor : S- 329 /PK/2017
Tanggal 20 Maret 2017

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Reperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Provinsi Sumatera Selatan	Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai
2	Provinsi Sumatera Selatan	Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
3	Provinsi Sumatera Selatan	Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai

Lampiran 2 Surat Dirjen PK
Nomor : S- 326 /PK/2017
Tanggal 15 Maret 2017

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Reperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kota Tasikmalaya	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
2	Kota Payakumbuh	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 07 Tahun 2010 tentang Retribusi Kendaraan Bermotor	-	√	Selesai
3	Kab. Bantul	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	√	Selesai
4	Kab. Bantul	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai

Lampiran 2 Surat Dirjen PK
Nomor : S- 316/PK/2017
Tanggal 10 Maret 2017

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Reperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kota Bandung	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai
2	Kota Cilegon	Retribusi Pemakaman	-	√	Selesai
3	Kota Bukittinggi	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	-	√	Selesai
4	Kota Bukittinggi	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir	-	√	Selesai
5	Kota Bukittinggi	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	-	√	Selesai
6	Kab. Gayo Lues	Izin Pembangunan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai
7	Kab. Subang	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai
8	Kab. Subang	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	-	-	*) Tidak diproses
9	Kab. Ciamis	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai
10	Kab. Blora	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir	-	√	Selesai
11	Kab. Klaten	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai

Keterangan
*) tidak diproses karena softcopy / hardcopy Raperda tidak disampaikan.

Lampiran 2 Surat Dirjen PK
Nomor : S- 308 /PK/2017
Tanggal 1 Maret 2017

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Reperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Bangka	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	-	√	Selesai
2	Kab. Soppeng	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
3	Kab. Soppeng	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
4	Kab. Majene	Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	-	√	Selesai
5	Kab. Majene	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	-	√	Selesai
6	Kab. Majene	Retribusi Izin Pengelolaan Limbah Cair	-	√	Selesai
7	Kab. Majene	Retribusi Tempat Pelelangan	-	√	Selesai
8	Kab. Bangli	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan	-	√	Selesai
9	Kab. Bangli	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	√	Selesai
10	Kab. Buleleng	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan	-	√	Selesai

Lampiran 2 Surat Dirjen PK
Nomor : S- 241 /PK/2017
Tanggal 28 Februari 2017

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Reperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Rokan Hilir	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar	-	√	Selesai
2	Kab. Indragiri Hulu	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
3	Kab. Siak	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal	-	√	Selesai
4	Kab. Siak	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir	-	√	Selesai
5	Kab. Siak	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek	-	√	Selesai
6	Kab. Siak	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	√	Selesai
7	Kab. Siak	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	√	Selesai
8	Kab. Siak	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	-	√	Selesai
9	Kab. Siak	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai
10	Kab. Tegal	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah	-	√	Selesai
11	Kab. Bondowoso	Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
12	Kab. Situbondo	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendaliam Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai

Lampiran 2 Surat Dirjen PK
Nomor : S- 240 /PK/2017
Tanggal 28 Februari 2017

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Reperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kota Bandar Lampung	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai
2	Kota Bandar Lampung	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
3	Kota Bandar Lampung	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai
4	Kota Dumai	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	√	Selesai
5	Kota Dumai	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	√	Selesai
6	Kota Batam	Pajak Daerah	-	-	**Sudah diberikan rekomendasi melalui Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-231/PK/2017 tanggal 24 Februari 2017**
7	Kota Kotamobagu	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	-	√	Selesai
8	Kota Kotamobagu	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar	-	√	Selesai
9	Kota Kotamobagu	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	√	Selesai
10	Kota Kotamobagu	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rumah Susun Sederhana Sewa	-	√	Selesai
11	Kota Kotamobagu	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Balai Benih Ikan Mogalaing Kota Kotamobagu	-	√	Selesai
12	Kab. Lampung Tengah	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai

No.	Nama Daerah	Nama Reperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
13	Kab. Dharmasraya	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai
14	Kab. Ogan Komering Ilir	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 27 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	√	Selesai
15	Kab. Ogan Komering Ilir	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai
16	Kab. Ogan Komering Ilir	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	√	Selesai
17	Kab. Ogan Komering Ilir	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Pasar	-	√	Selesai
18	Kab. Ogan Komering Ilir	Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung	-	√	Selesai
19	Kab. Ogan Komering Ilir	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	-	√	Selesai
20	Kab. Aceh Utara	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	-	√	Selesai
21	Kab. Natuna	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah	-	√	Selesai

Lampiran 2 Surat Dirjen PK
Nomor : S- 231 /PK/2017
Tanggal 24 Februari 2017

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Reperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kota Balikpapan	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
2	Kota Balikpapan	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
3	Kota Balikpapan	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai
4	Kota Batam	Pajak Daerah	-	√	Selesai
5	Kab. Banjar	Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
6	Kab. Banjar	Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
7	Kab. Tapin	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	√	Selesai
8	Kab. Tapin	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
9	Kab. Hulu Sungai Tengah	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran	-	√	Selesai
10	Kab. Barito Kuala	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur,Takar, Timbang dan Perlengkapannya	-	-	*) Tidak diproses
11	Kab. Balangan	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat	-	√	Selesai
12	Kab. Tabalong	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	√	Selesai

Keterangan
*) tidak diproses karena softcopy / hardcopy Raperda tidak disampaikan.

Lampiran 2 Surat Dirjen PK
Nomor : S- 230 /PK/2017
Tanggal 24 Februari 2017

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Reperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kota Pekalongan	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar	-	√	Selesai
2	Kota Pekanbaru	Retribusi Perpanjangan Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai
3	Kota Singkawang	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai
4	Kota Singkawang	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	-	-	Sudah diberikan rekomendasi melalui Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-485/PK/2016 tanggal 26 Juli 2016
5	Kab. Tanah Bumbu	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran	-	√	Selesai
6	Kab. Toraja Utara	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	√	Selesai
7	Kab. Maros	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	-	√	Selesai
8	Kab. Maros	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
9	Kab. Banjarnegara	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah	-	√	Selesai
10	Kab. Pati	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai

Lampiran 2 Surat Dirjen PK
Nomor : S- 213 /PK/2017
Tanggal 10 Februari 2017

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Reperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Prov. Jawa Tengah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai

Lampiran 2 Surat Dirjen PK
Nomor : S- 211 /PK/2017
Tanggal 9 Februari 2017

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Reperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kota Banda Aceh	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	-	√	Selesai
2	Kota Palembang	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai
3	Kab. Aceh Singkil	Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai
4	Kab. Kerinci	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
5	Kab. Kerinci	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
6	Kab. Sinjai	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai
7	Kab. Sinjai	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	-	√	Selesai
8	Kab. Sinjai	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	-	√	Selesai
9	Kab. Wajo	Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai
10	Kab. Enrekang	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
11	Kab. Maros	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai

Lampiran 2 Surat Dirjen PK
Nomor : S- 210 /PK/2017
Tanggal 9 Februari 2017

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Reperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kota Mataram	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
2	Kota Mataram	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai
3	Kab. Bireuen	Perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai
4	Kab. Seruyan	Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	√	Selesai
5	Kab. Gorontalo	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
6	Kab. Gorontalo	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
7	Kab. Gorontalo	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai
8	Kab. Pekalongan	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah	-	√	Selesai

Lampiran 2 Surat Dirjen PK
Nomor : S- 168 /PK/2017
Tanggal 2 Februari 2017

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Reperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Provinsi Papua Barat	Retribus Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	-	√	Selesai
2	Kota Bandung	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Prasarana Olahraga	-	√	Selesai
3	Kota Subulussalam	Perubahan atas Qanun Kota Subulussalam Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai
4	Kab. Lampung Tengah	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
5	Kab. Lampung Selatan	Perubahan Peraturan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan	-	√	Selesai
6	Kab. Lampung Selatan	Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	√	Selesai
7	Kab. Lampung Selatan	Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	-	√	Selesai
8	Kab. Lahat	Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah	-	√	Selesai
9	Kab. Donggala	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai
10	Kab. Barru	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai
11	Kab. Wonogiri	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Wonogiri	-	√	Selesai
12	Kab. Klaten	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai

No.	Nama Daerah	Nama Reperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
13	Kab. Malang	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
14	Kab. Alor	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
15	Kab. Alor	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
16	Kab. Dogiyai	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-	√	Selesai

Lampiran 2 Surat Dirjen PK
Nomor : S- 167 /PK/2017
Tanggal 2 Februari 2017

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Reperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Provinsi Papua Barat	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Kendaraan Bermotor	-	-	*) Tidak diproses
2	Kab. Kubu Raya	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	√	Selesai
3	Kab. Dompu	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
4	Kab. Dompu	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	-	√	Selesai
5	Kab. Buru	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan	-	√	Selesai
6	Kab. Jayapura	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai
7	Kab. Jayapura	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
8	Kab. Jayapura	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai

Keterangan
*) tidak diproses karena softcopy / hardcopy Raperda tidak disampaikan.

Lampiran 2 Surat Dirjen PK
Nomor : S- 1448/PK/2017
Tanggal 13 Januari 2017

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Reperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Melawi	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai
2	Kab. Kotawaringin Timur	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Penyeberangan di Air	-	√	Selesai
3	Kab. Kotawaringin Timur	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai

Lampiran 2 Surat Dirjen PK
Nomor : S- 147 /PK/2017
Tanggal 17 Januari 2017

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Reperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Provinsi Aceh	Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai
2	Provinsi Sumatera Utara	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	-	√	Selesai
3	Kota Magelang	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
4	Kota Magelang	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai
5	Kota Tanjungpinang	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
6	Kota Dumai	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	*) Tidak diproses
7	Kota Dumai	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	-	*) Tidak diproses
8	Kota Pekanbaru	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	-	√	Selesai
9	Kota Gorontalo	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	√	Selesai
10	Kota Gorontalo	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan	-	√	Selesai
11	Kab. Simeulue	Perubahan atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 30 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai
12	Kab. Simeulue	Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 27 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	-	√	Selesai

No.	Nama Daerah	Nama Reperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
13	Kab.Bengkalis	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	-	√	Selesai
14	Kab. Musi Rawas	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan	-	√	Selesai
15	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai
16	Kab. Tapanuli Utara	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	-	√	Selesai
17	Kab. Lebong	Retribusi Izin Gangguan	-	√	Selesai
18	Kab. Lebong	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai
19	Kab. Pesawaran	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	√	Selesai
20	Kab. Pesawaran	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan	-	√	Selesai
21	Kab. Pesawaran	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai
22	Kab. Kutai Barat	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	-	√	Selesai
23	Kab. Hulu Sungai Tengah	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
24	Kab. Balangan	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai
25	Kab. Gorontalo Utara	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai
26	Kab. Morowali Utara	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 17 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai
27	Kab. Morowali Utara	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai

No.	Nama Daerah	Nama Reperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
28	Kab. Kolaka	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	-	*) Tidak diproses
29	Kab. Luwu	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
30	Kab. Luwu Timur	Retribusi Pelayanan Parkirdi Tepi Jalan Umum	-	√	Selesai
31	Kab. Wajo	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai
32	Kab. Bangli	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	√	Selesai
33	Kab. Klungkung	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan	-	√	Selesai
34	Kab. Klungkung	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai
35	Kab. Sumba Barat	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai
36	Kab. Sumba Barat	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
37	Kab. Sumba Tengah	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
38	Kab. Sumba Tengah	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai
39	Kab. Sikka	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai
40	Kab. Maluku Tenggara Barat	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai
41	Kab. Maluku Tenggara Barat	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	-	√	Selesai

No.	Nama Daerah	Nama Reperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
42	Kab. Maluku Tenggara Barat	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
43	Kab. Maluku Tenggara Barat	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai

Keterangan

*) tidak diproses karena softcopy / hardcopy Raperda tidak disampaikan.

Lampiran 2 Surat Dirjen PK
Nomor : S- 146 /PK/2017
Tanggal 13 Januari 2017

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Reperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kota Tangerang	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai
2	Kota Tangerang	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
3	Kota Tangerang	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
4	Kota Lhokseumawe	Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	√	Selesai
5	Kota Banjarmasin	Retribusi Rumah Potong Hewan	-	√	Selesai
6	Kota Jayapura	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
7	Kab. Seluma	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
8	Kab. Nagan Raya	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	-	√	Selesai
9	Kab. Nagan Raya	Perubahan atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pendirian dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai
10	Kab. Nagan Raya	Perubahan atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
11	Kab. Nagan Raya	Perubahan atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan	-	√	Selesai
12	Kab. Nagan Raya	Perubahan atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai

No.	Nama Daerah	Nama Reperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
13	Kab. Aceh Timur	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	-	√	Selesai
14	Kab. Aceh Timur	Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
15	Kab. Kotabaru	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
16	Kab. Tangerang	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
17	Kab. Boven Digoel	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Terminal	-	√	Selesai
18	Kab. Boven Digoel	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	√	Selesai

Lampiran 2 Surat Dirjen PK
Nomor : S- 2 /PK/2017
Tanggal 6 Januari 2017

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Reperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kota Semarang	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
2	Kota Pekalongan	Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Gangguan	-	√	Selesai
3	Kab. Konawe	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
4	Kab. Konawe	Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang	-	√	Selesai
5	Kab. Konawe	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	-	√	Selesai
6	Kab. Konawe	Retribusi Alat Berat Bermesin di Pelabuhan	-	√	Selesai
7	Kab. Konawe	Retribusi Perizinan dan Pengelolaan Objek Wisata Oleh Swasta	-	√	Selesai
8	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
9	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai